

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

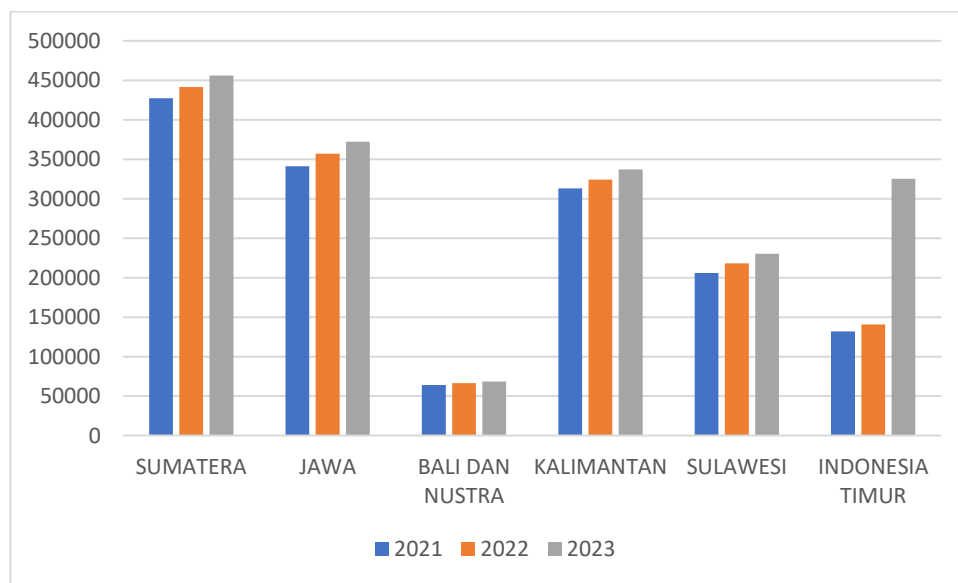
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah atau total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita dapat menjelaskan seberapa besar kemampuan daerah untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita berdasarkan harga konstan mengukur perubahan persentase nilai total semua barang dan jasa yang di produksi di suatu daerah, dibagi dengan jumlah penduduk. Indikator ini sering digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi suatu wilayah. Wilayah dengan Produk Domestik Bruto Per Kapita yang tinggi biasanya memiliki pendapatan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya ameningkatkan kesejahteraan. (Samudra & Langsa, 2025)

Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik (solow-swan) menurut Robert. M. Solow (1950), mengaitkan pendapatan perkapita dengan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh ketersediaan faktor-faktor modal (K) tenaga kerja (L) hasil/output (Y). Oleh karena itu, semakin berkualitas tenaga kerja maka semakin tinggi potensi output per kapita yang dapat meningkatkan kesejahteraan rata-rata penduduk. (Lazuardi & Kharisma, 2024).

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita sering dijadikan tolak ukur kemakmuran suatu daerah, karena mencerminkan rata-rata yang tampak baik

pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk. Namun dibalik angka rata-rata yang baik seringkali tersembunyi ketimpangan. Ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi tantangan besar dalam perjalanan ekonomi Indonesia menuju keberlanjutan dan keadilan. Salah satu indikator utama yang sering digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan pembangunan suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan rata-rata pendapatan masyarakat suatu wilayah dan mencerminkan keberhasilan distribusi hasil pembangunan (Todaro & Smith, 2020). Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi secara agregat, kenyataannya masih banyak provinsi yang tertinggal dari segi kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, terdapat disparitas Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita yang mencolok antarpulau di Indonesia. Pulau Sumatera mencatat rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita tertinggi, diikuti oleh Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Indonesia Timur, dan terakhir Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam, belum tentu sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh wilayah Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2025)

Gambar 1.1

PDRB Per kapita Wilayah Kepulauan di Indonesia Tahun 2021 – 2023 (Ribu rupiah)

Data diatas mengungkapkan paradoks pembangunan Indonesia, di mana beberapa provinsi kaya sumber daya seperti Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera mencatatkan Produk Domestik Regional Per Kapita yang sangat tinggi, sementara provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, atau DI Yogyakarta justru memiliki angka yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi suatu wilayah terhadap total Produk Domestik Regional Bruto nasional belum tentu sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat secara rata-rata. Artinya, kontribusi terhadap total output regional nasional tidak identik dengan kesejahteraan per individu di wilayah tersebut.

Meskipun Pulau Jawa tidak memiliki rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita tertinggi dibandingkan pulau lain, namun wilayah ini memiliki

urgensi dan kompleksitas yang sangat penting untuk diteliti. Pertama, Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi nasional yang berkontribusi sekitar 58% terhadap total Produk Domestik Bruto nasional (Aghnan Y. Anggara, 2024), menjadikannya tulang punggung perekonomian Indonesia. Kedua, dengan populasi lebih dari 151 juta jiwa atau sekitar 56% dari total penduduk Indonesia yang terkonsentrasi di wilayah seluas hanya 6,8% dari total luas daratan Indonesia, Pulau Jawa menghadapi tantangan densitas ekonomi dan demografis yang unik. Ketiga, sebagai lokasi ibu kota negara dan pusat industri manufaktur terbesar, kebijakan ekonomi yang diterapkan di Pulau Jawa memiliki efek spillover yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Hal yang lebih menarik lagi, di balik dominasi ekonomi nasionalnya, Pulau Jawa justru menunjukkan ketimpangan internal yang sangat tajam. Pulau Jawa terdiri dari enam provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, yang secara geografis berdekatan, namun menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal Produk Domestik Regional Bruto per kapita (BPS, 2025). Disparitas ini bahkan lebih ekstrem dibandingkan dengan perbedaan PDRB per kapita antarpulau di Indonesia, menunjukkan adanya masalah struktural yang kompleks dalam distribusi kesejahteraan di pusat ekonomi nasional.

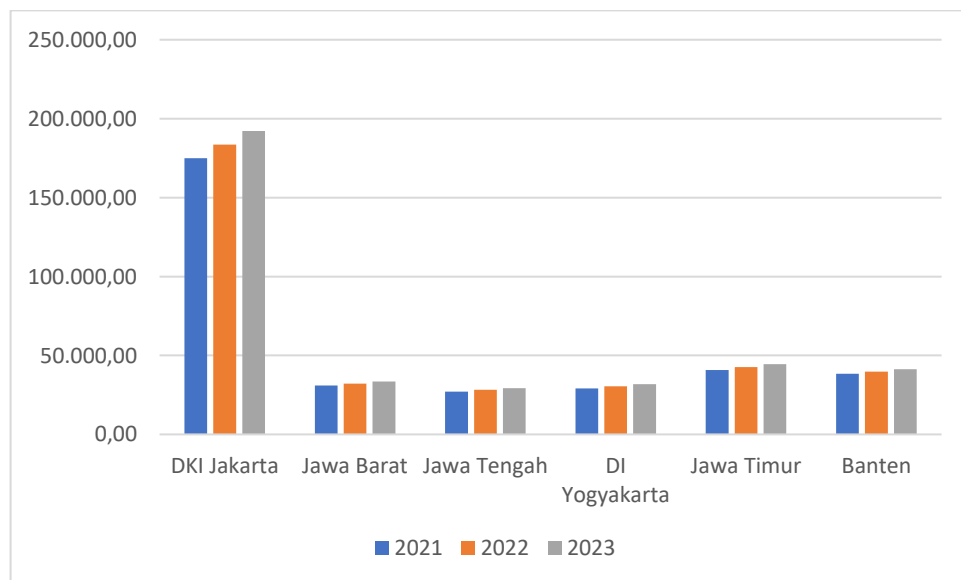
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Tidak hanya mencerminkan rata-rata pendapatan masyarakat, indikator ini juga menunjukkan efektivitas kebijakan pembangunan dan distribusi hasil ekonomi (Todaro & Smith, 2020). Signifikansi Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita semakin terlihat

saat dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemerataan dan peningkatan kualitas hidup. Produk Domestik Regional Bruto sendiri dihitung melalui dua cara, yaitu Produk Domestik Regional Bruto harga tetap di mana perhitungan menggunakan harga tahun dasar, dan Produk Domestik Regional Bruto harga berlaku dimana perhitungan menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi tahunan riil yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencerminkan kapasitas sumber daya ekonomi, pergeseran atau perubahan, dan struktur ekonomi suatu wilayah.

Menurut teori Kuznets (1955), pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, namun akan menurun pada tahap yang lebih maju. Teori ini menjadi kerangka penting dalam memahami dinamika pertumbuhan dan kesenjangan antar wilayah. Namun, fenomena di Pulau Jawa menunjukkan pola yang berbeda, dimana meskipun telah mencapai tahap pembangunan yang relatif maju, ketimpangan justru masih sangat tinggi, bahkan cenderung melebar dalam dua dekade terakhir.

Meski Pulau Jawa telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam dua dekade terakhir, kenyataannya masih terdapat kesenjangan signifikan antar provinsi. Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang terletak di Pulau Jawa belum mampu mendistribusikan manfaat pembangunan secara merata ke seluruh wilayah. Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta mencatat pertumbuhan

yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di pulau yang sama (Shela Rahmat, 2025), mencerminkan adanya disparitas ekonomi yang mencolok di tengah dominasi ekonomi nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Gambar 1.2

PDRB Perkapita Provinsi Pulau Jawa Tahun 2021-2023 (Ribuan rupiah)

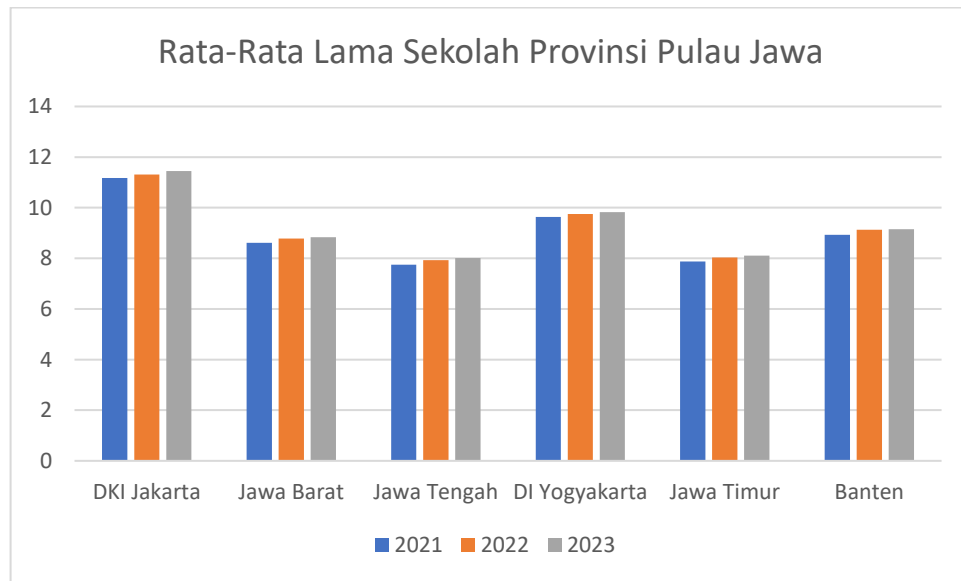
Berdasarkan data pada Gambar 1.2, terlihat adanya tren peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita di hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa selama periode 2021–2023, meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Di antara keenam provinsi, DKI Jakarta secara konsisten menempati posisi tertinggi, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto per kapita mencapai 192.13 juta rupiah pada tahun 2023. Provinsi lain seperti Jawa Timur dan DI Yogyakarta juga menunjukkan angka yang relatif tinggi, sementara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten berada pada level yang lebih rendah, meskipun tetap mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Masalah yang mengkhawatirkan adalah semakin melebarnya kesenjangan antara DKI Jakarta dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Pada tahun 2018, rasio Produk Domestik Regional Per Kapita DKI Jakarta terhadap Jawa Tengah adalah 5,4:1, namun pada tahun 2023 rasio ini meningkat menjadi 6,6:1. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun semua provinsi mengalami pertumbuhan, kecepatan pertumbuhan DKI Jakarta jauh lebih tinggi, sehingga kesenjangan justru semakin melebar.

Dalam perspektif teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dikemukakan oleh Paul Romer (1990) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Arief Hakim (2025), faktor-faktor internal seperti investasi, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan bersumber dari dalam sistem ekonomi itu sendiri (endogen), di mana investasi pada sektor pendidikan dan kualitas sumber daya manusia akan menghasilkan efek spillover yang berkelanjutan.

Konsep ini relevan dalam menganalisis determinan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita di Pulau Jawa, karena variabel seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diduga memainkan peran strategis dalam mendorong kesejahteraan ekonomi regional dari dalam sistem produksinya. Teori pertumbuhan endogen memprediksi bahwa daerah dengan investasi yang lebih besar pada faktor-faktor internal ini akan mengalami pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih tinggi.

Salah satu faktor yang turut memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita adalah pendidikan. Karakter sosial dan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh struktur pendidikan yang ada (Todaro, 2013). Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dengan melihat batas maksimum dan minimum untuk Rata-rata Lama Sekolah. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah 15 Tahun dan batas minimum adalah 0 Tahun. Batas maksimum 15 Tahun mengindikasikan tingkat pendidikan Setara lulusan Sekolah Menengah Atas (Nurfitri, 2021). Teori modal manusia menyebutkan manusia dengan tingkat pendidikan tinggi dilihat dari lamanya waktu sekolah berkesempatan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding manusia dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Rata-rata lama sekolah merefleksikan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja di suatu wilayah. Tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil cenderung lebih produktif. Selain itu, tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan munculnya inovasi dan penggunaan teknologi yang lebih canggih. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mendorong peningkatan PDRB. Kemudahan dalam mengakses pendidikan akan membantu masyarakat mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi (Kurniawan, 2025).



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Gambar 1.3

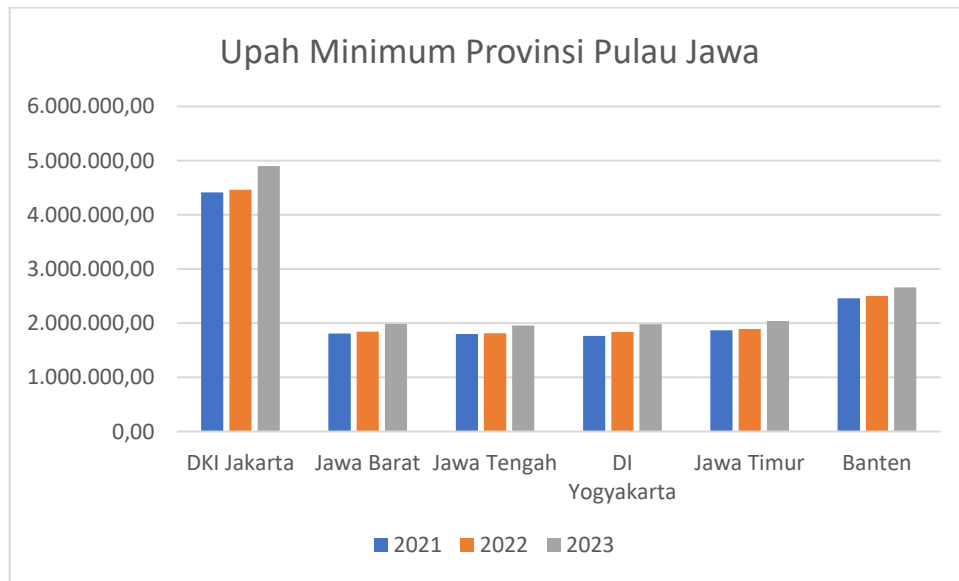
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Pulau Jawa Tahun 2021-2023 (Tahun)

Berdasarkan pada Gambar 1.3, secara umum provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 memiliki rata-rata lama sekolah yang jauh lebih tinggi mencapai 11,45 tahun, diikuti oleh DI Yogyakarta. Sementara itu, provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten memiliki rata-rata lama sekolah yang relatif rendah. Meskipun demikian, semua provinsi menunjukkan tren positif berupa peningkatan rata-rata lama sekolah pada tiap tahun di provinsinya.

Fenomena yang menarik adalah disparitas rata-rata lama sekolah yang sangat ekstrem antar provinsi di Pulau Jawa. Rata-rata lama sekolah DKI Jakarta pada tahun 2023 lebih besar dibandingkan rata-rata lama sekolah provinsi lainnya. Perbedaan ini mencerminkan adanya disparitas pendidikan antar provinsi yang signifikan.

Pendidikan yang lebih baik nantinya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja akan berpengaruh terhadap upah yang diterima pekerja (Aji et al., 2020). Dalam konteks ini, Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat menarik investasi dan kesejahteraan langsung masyarakat pekerja. Upah Minimum Provinsi (UMP) juga menjadi variabel penting yang memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di tingkat regional. Upah Minimum Provinsi berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya melindungi kesejahteraan pekerja, tetapi juga berdampak pada daya beli masyarakat serta konsumsi domestik. Upah minimum merupakan gaji bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. Upah minimum juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya upah minimum merupakan komponen penting dalam pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Upah minimum berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu penting untuk tenaga kerja dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran.

Teori upah efisiensi menjelaskan bahwa pemberian upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitas melalui peningkatan motivasi kerja, perbaikan nutrisi, serta penurunan angka pergantian tenaga kerja (Mankiw, 2019). Dengan demikian, kenaikan upah dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Faizin, 2021). Upah Minimum Provinsi juga merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial pemerintah untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja dengan menetapkan batas minimum yang adil (Akbar, 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Gambar 1.4
Upah Minimum Provinsi Provinsi Pulau Jawa Tahun 2021-2023 (Rupiah)

Berdasarkan data pada Gambar 1.4, setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari tahun ke tahun selama periode pengamatan, meskipun dengan besaran yang bervariasi. Pada tahun 2023, DKI Jakarta mencatat Upah Minimum Provinsi tertinggi sebesar 4.091.798 rupiah. Sementara itu, provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten mengalami kenaikan Upah Minimum Provinsi yang cenderung moderat.

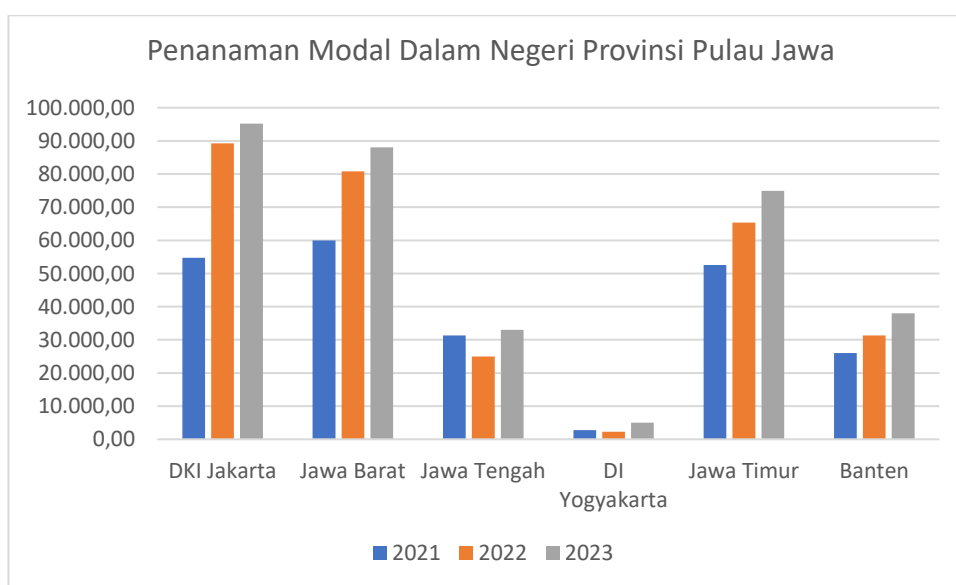
Provinsi dengan pendidikan yang tinggi seperti DKI Jakarta, cenderung memiliki potensi produktivitas tenaga kerja yang tinggi, menunjukkan adanya keterkaitan antara pendidikan dan tenaga kerja yang produktif yang pada akhirnya dapat mendorong perusahaan untuk menetapkan upah minimum provinsi yang lebih tinggi. Perbedaan Upah Minimum Provinsi yang cukup signifikan antar provinsi di

Pulau Jawa menciptakan disparitas potensial dalam kesejahteraan pekerja dan daya saing antar wilayah, yang pada akhirnya berdampak pada mobilitas tenaga kerja dan distribusi aktivitas ekonomi.

Kesejahteraan pekerja yang tercermin dalam Upah Minimum Provinsi memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Upah yang memadai memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan. Dalam konteks pembangunan regional, pendidikan menjadi indikator kunci yang menghubungkan kesejahteraan ekonomi dengan kualitas sumber daya manusia (Akbar, 2022).

Selain Upah Minimum Provinsi, Peningkatan investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran. Investasi menjadi memiliki peranan penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Investasi di Indonesia dikenal dalam dua bentuk yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sering dilakukan oleh pemerintah/swasta, kemudian ada Penanaman Modal Asing (PMA) yang dilakukan oleh pihak luar negeri. Bukan hanya pihak swasta yang aktif dalam berinvestasi, tetapi pemerintah pun turut aktif dalam penanaman modal. Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, ketika pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta penambahan aset, pembiayaan pembangunan infrastruktur inilah yang disebut dengan belanja modal. Belanja modal ini mencakup pengeluaran yang berkaitan dengan investasi

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan (Pirda & Danisa, 2018) Pembentukan modal menjadi bahan perhatian terutama dalam investasi swasta. Hal ini senada dengan pendapat (Zaris: 1987) yang menyatakan bahwa investasi swasta berperan penting dalam pembentukan pola pembangunan di daerah, sehingga melalui investasi ini terbentuknya modal daerah (regional capital information).



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Gambar 1.5

**Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Pulau Jawa Tahun 2021-2023
(Milyar Rupiah)**

Berdasarkan pada Gambar 1.5, secara umum terlihat bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Barat dan DKI Jakarta secara konsisten mencatatkan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri yang paling tinggi yaitu 95.202 miliar rupiah di antara provinsi lainnya selama periode tersebut diikuti oleh provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten yang mengalami peningkatan.

Sementara itu, DI Yogyakarta mencatatkan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri paling rendah dari seluruh provinsi di Pulau Jawa. Daerah dengan tingkat urbanisasi tinggi dan pusat kegiatan ekonomi seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur cenderung menarik lebih banyak investasi domestik. Sementara itu, daerah seperti DI Yogyakarta masih memiliki potensi yang perlu dikembangkan agar mampu menarik lebih banyak Penanaman Modal Dalam Negeri di masa depan.

Yang menarik untuk dicermati adalah pola yang tidak selalu linier antara kesejahteraan ekonomi (RLS dan UMP) dengan PMDN. Provinsi DI Yogyakarta, meskipun memiliki Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang relatif rendah, fenomena ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara indikator ekonomi dan pendidikan, dimana faktor-faktor lain seperti kualitas pendidikan, pola hidup, dan tenaga kerja turut berperan penting. Perbedaan angka Penanaman Modal Dalam Negeri antar provinsi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam investasi daerah yang belum merata di seluruh provinsi di Pulau Jawa.

Ketiga variabel Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki keterkaitan yang saling memperkuat dalam mempengaruhi PDRB per kapita. Rata-Rata Lama Sekolah sebagai indikator pendidikan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang tercermin dalam Upah Minimum Provinsi. Upah Minimum Provinsi yang memadai kemudian meningkatkan daya beli masyarakat dan menarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada gilirannya, Penanaman Modal Dalam Negeri yang tinggi mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat yang

dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi regional yang terukur dalam PDRB per kapita. Namun, pola hubungan ini tidak selalu linier dan terdapat kompleksitas yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, terutama dalam konteks disparitas yang terjadi di Pulau Jawa.

Kompleksitas hubungan antara ketiga variabel yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita menjadi penting untuk dikaji lebih dalam, mengingat pola hubungan antar provinsi di Pulau Jawa tidak selalu menunjukkan kecenderungan yang seragam. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita diukur secara bruto, yang berarti mencakup nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi tanpa memperhitungkan depresiasi aset. Konsep ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas ekonomi suatu daerah, dan menjadikannya alat penting dalam analisis pembangunan regional (Tjaja & Yusnida, 2022).

Sejumlah studi empiris juga menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki hubungan signifikan terhadap PDRB Per Kapita. Dari aspek pendidikan, Penelitian oleh Yosef (2024) dan Nurfiani (2021) menemukan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. Dalam aspek ketenagakerjaan, penelitian oleh Annisa (2024) menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nichauri (2022) menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Per

Kapita. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Etik (2023) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. Sementara itu, dari aspek investasi, penelitian yang dilakukan oleh Shela (2025) menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Teddy (2023) menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan data lintas provinsi di seluruh Indonesia atau fokus pada satu provinsi tertentu, sehingga belum memberikan analisis yang komprehensif tentang dinamika spesifik di Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional. Selain itu, penelitian yang ada belum mengeksplorasi secara mendalam mengapa terjadi disparitas yang sangat tinggi antar provinsi di Pulau Jawa, padahal secara geografis dan infrastrukural wilayah tersebut relatif homogen.

Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan (novelty) yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya. Pertama, fokus spesifik pada Pulau Jawa sebagai satu kesatuan ekonomi regional yang memiliki karakteristik unik sebagai pusat ekonomi nasional dengan disparitas internal yang tinggi. Kedua, penggunaan data panel enam provinsi selama periode 2018-2023 memungkinkan analisis dinamis yang lebih komprehensif dibandingkan studi cross-section. Ketiga, Sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis hubungan variabel-variabel tersebut dalam konteks nasional atau hanya di satu provinsi, sehingga penelitian ini

memberikan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap dinamika ekonomi di Pulau Jawa.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme pembangunan ekonomi regional di pusat ekonomi nasional, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi model analisis untuk wilayah-wilayah ekonomi strategis lainnya di Indonesia.

Berdasarkan fenomena, masalah, urgensi, *research gap* dan *novelty* yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap PDRB Per Kapita pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2023"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara parsial terhadap PDRB Per Kapita pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara simultan terhadap PDRB Per Kapita pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara parsial terhadap PDRB Per Kapita pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2023.
2. Untuk mengetahui Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara simultan terhadap PDRB Per Kapita pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dan manfaat sebagai pengetahuan tentang Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap PDRB Per Kapita pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2023. Penelitian ini juga dapat membuka jalan bagi para penelitian selanjutnya yang lebih dalam tentang topik dan permasalahan yang sama pada penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi civitas akademika terkait pengaruh pendapatan asli daerah, upah minimum provinsi dan angka harapan hidup terhadap produk domestik regional bruto

